



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1434, 2015

BMKG. Reformasi Birokrasi. Road Map. 2015-2019.

**PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 2015 - 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 2015 - 2019.

Pasal 1

Menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015 - 2019.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015 - 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika periode 2015 - 2019.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015 - 2019 terbagi dalam area yang meliputi uraian kegiatan komponen, tujuan kegiatan, bukti penerapan, koordinator serta waktu pelaksanaannya.

Pasal 4

Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tata laksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
6. penguatan akuntabilitas;
7. penguatan pengawasan; dan
8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 september 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 2015-2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 2015-2019

URAIAN KEGIATAN KOMPONEN		TUJUAN KEGIATAN	BUNTI PENERAPAN	KOORDINATOR	WAKTU PELAKSANAAN				
A. PROSES					2015	2016	2017	2018	2019
1. MANAJEMEN PERUBAHAN									
a. Menyusun tugas-tugas dalam kelompok kerja Reformasi Birokrasi ke dalam tugas dan fungsi organisasi		Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses tugas dan fungsi organisasi, dan memperhatikan pola pikir serta budaya reformasi	Tugas dan fungsi unit kerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, dan memperhatikan pola pikir serta budaya reformasi	Biro Hukum dan Organisasi	x				
2. Road Map Reformasi Birokrasi									
a. Road Map Reformasi Birokrasi		Program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bersifat reformasi dan bertujuan mencapai tujuan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Road Map	Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Road Map yang memuat pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi	Biro Perencanaan	x				
b. Melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan dalam bidang/tugas dan fungsi yang mendukung reformasi birokrasi		Sosialisasi kegiatan program/kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi	Laporan sosialisasi	Keproses Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Umum	x	x	x	x	x
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi									
a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPLB) dan hasil PMPLB dikomunikasikan kepada pemangku/pelaksana pelaksanaan kegiatan/bidang		Pemantauan dan <i>Self-assessment</i> oleh pelaksana reformasi birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Rapat Koordinasi dan laporan pemantauan setiap semester		x	x	x	x	x
b. Penilaian bagi Tim Asesor PMPLB		Peningkatan Kapasitas	Laporan pelaksanaan dalam forum PMPLB, koordinasi dan pelatihan birokrasi	Inspektorat Utama	x	x	x	x	x
c. Evaluasi Rencana Aksi (RKA) dan pelaksanaan road map dilaksanakan setiap 1 (satu) semester		Pemantauan dan pelaksanaan PMPLB setiap tahunnya	Rapat Koordinasi dan laporan pemantauan setiap semester		x	x	x	x	x
4. Perubahan pola pikir dan budaya birokrasi									
a. Menetapkan road map Reformasi Birokrasi dalam bidang/tugas dan fungsi yang mendukung reformasi birokrasi		Memperjelas program dan kegiatan dalam bidang/tugas dan fungsi Reformasi Birokrasi	Program Reformasi Birokrasi	Deputi bidang Instrumentasi, Kolaborasi, Rencayasa, dan Jaringan Sekretariat Utama	x				
b. Mengembangkan informasi tentang reformasi birokrasi BMKG di website BMKG		Menginformasikan program reformasi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses reformasi BMKG	Laporan identifikasi dan pemantauan	Sekretariat Utama	x	x	x	x	x
c. Identifikasi dan pemantauan <i>agent of change</i> BMKG		Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 dan pelaksanaan <i>role model</i> instansi BMKG	Laporan identifikasi dan pemantauan	Sekretariat Utama	x	x	x	x	x
5. Internalisasi dari pimpinan kepada pegawai		Implementasi tentang strategi rencana dan aktivitas manajemen perubahan	Pembekalan dan ceramah pimpinan, pelayanan publik	Inspektorat	x	x	x	x	x
II. PERSAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
1. Harmonisasi									
a. Peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron		Terdapat pemetaan peraturan yang jelas, sistematis, sinkron, dan tidak bertentangan, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan hasil identifikasi dan pemantauan	Biro Hukum dan Organisasi	x	x	x	x	x
b. Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron		Tidak lanjut pada II.1.a	Laporan hasil revisi peraturan perundang-undangan		x	x	x	x	x
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan									
a. Pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		Memastikan apakah penyusunan Peraturan Perundang-undangan di BMKG telah sesuai dan apa saja hambatan yang dihadapi	Hasil evaluasi penerapan Peraturan Perundang-undangan tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BMKG	Biro Hukum dan Organisasi	x				
III. PERSAATAN DAN PENGUATAN ORGANISASI									
1. Evaluasi									
a. Evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi organisasi yang ada		Evaluasi ketepatan fungsi organisasi, tumpang tindih tugas, dan kemampuan adaptasi organisasi	Survei Kesiapan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	x	x	x	x	x
b. Evaluasi organisasi mengenai duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi					x				
c. Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis									
2. Pemetaan									
a. Pemetaan		Tidak lanjut evaluasi dengan perubahan organisasi (bila ada)							
IV. PERSAATAN TATA LAKSANA									
1. Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)									
a. Identifikasi Jumlah SOP yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, akan direvisi, dan yang belum dibuat		Memperjelas SOP apa saja yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan yang belum dibuat	Laporan Jumlah SOP yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, akan direvisi, dan yang belum dibuat	Biro Hukum dan Organisasi		x			
b. Evaluasi peta proses bisnis yang dilaksanakan dengan perkembangan teknologi, perubahan tugas fungsi, struktur birokrasi dan tuntutan perubahan strategis		Memperjelas peta proses bisnis	Peta proses bisnis			x	x	x	x